

Dapatkan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Menurunkan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia?

Yunidar Purnama Sari¹

¹Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia
Email Corresponding: yunidar.purnama@utu.ac.id

Article History

Received: 17-01-2025

Revision: 18-01-2025

Accepted: 26-01-2025

Published: 31-01-2025

Abstract. Government spending in the form of central-to-regional transfers represents an effort by the government to reduce income inequality across regions in Indonesia. Therefore, this study aims to analyze income inequality through government budget allocations to regions, including special allocation funds (DAK), general allocation funds (DAU), and revenue-sharing funds (DBH). This research utilizes secondary data from 2007 to 2022, sourced from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Statistics Indonesia (BPS). The results of this study indicate that special allocation funds contribute to reducing income inequality. Conversely, general allocation funds tend to increase income inequality, while revenue-sharing funds do not significantly impact income inequality in Indonesia. The government needs to focus on equitable regional development by increasing special allocation funds, particularly for underdeveloped regions, but with careful planning. General allocation funds should also be adjusted based on the fiscal capacity and economic potential of each region. Furthermore, to optimize revenue-sharing funds, the government must improve the quality of human resources through education and skill training relevant to regional leading sectors, as well as strengthen institutional capacity to ensure more effective fund management. Ultimately, these efforts can help reduce interregional inequality.

Keywords: DAK, DAU, DBH, Income Inequality

Abstrak. Anggaran belanja pemerintah berupa transfer pusat ke daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan pada setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan melalui anggaran belanja pemerintah ke daerah yang meliputi dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Penelitian ini menggunakan data sekunder mulai dari tahun 2007 hingga 2022 yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus dapat berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan, namun sebaliknya dana alokasi umum dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapat di Indonesia. Pemerintah perlu fokus pada pemerataan pembangunan antar daerah dengan meningkatkan dana alokasi khusus untuk khususnya di daerah tertinggal, namun harus dengan perencanaan yang matang, serta menyesuaikan dana alokasi umum berdasarkan kapasitas fiskal dan potensi ekonomi daerah. Selain itu agar dana bagi hasil lebih optimal, pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan sektor unggulan daerah, serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar pengelolaan dana lebih tepat, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.

Kata Kunci: DAK, DAU, DBH, Ketimpangan Pendapatan

PENDAHULUAN

Secara umum, setiap negara mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan pemerataan pendapatan melalui pembangunan ekonomi. Ketidakseragaman karakteristik sumber daya akan berpengaruh pada kemampuan suatu daerah untuk tumbuh, sehingga ada beberapa wilayah dapat tumbuh dengan cepat, namun ada juga beberapa daerah yang tumbuh lebih lambat. Hal inilah yang memicu adanya ketimpangan pendapatan antar daerah. Ketimpangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam pembangunan suatu daerah. Dampak positifnya, memberikan dorongan kepada daerah yang tertinggal untuk dapat bersaing meningkatkan kualitas hidupnya, namun dampak negatifnya adalah inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas (Oktarina & Yuliana, 2023).

Data Gini Rasio di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2022 (Gambar 1) menunjukkan fluktuasi yang mencolok dalam ketimpangan pendapatan. Gini Rasio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu populasi, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan maksimum. Dalam periode ini, Gini Rasio Indonesia menunjukkan tren peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan, terutama antara tahun 2011 dan 2012, ketika rasio meningkat dari 0,388 menjadi 0,413. Setelah itu, meskipun ada beberapa penurunan, nilai Gini Rasio tetap berada di atas 0,38, yang mengindikasikan ketimpangan pendapatan terus terjadi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023

Gambar 1. Gini Rasio di Indonesia Tahun 2007-2022

Masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia tercermin dari data ini, di mana nilai Gini Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, distribusi pendapatan tidak merata. Hal ini dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi negatif, seperti meningkatnya ketegangan sosial, inefisiensi ekonomi, dan berkurangnya stabilitas sosial. Ketimpangan yang terus berlanjut dapat memperburuk kondisi masyarakat yang kurang beruntung, membuat mereka sulit untuk bersaing dalam perekonomian.

Bahkan walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat, akan tetapi ketimpangan pendapatan justru menunjukkan sebaliknya (Gambar 1). Hal ini sejalan dengan temuan oleh Kuźmar

(2023); Yusuf & Halim (2021); Chongvilaivan & Kim (2016); Miranti et al (2013); Putri & Natha, (2014). Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan desentralisasi fiskal yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing-masing (Andriani & Wahid, 2018). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah serta meningkatkan pembangunan. Selain itu, tujuan desentralisasi fiskal yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal (baik dengan pemerintah pusat maupun antar daerah) dan mendorong pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam mendanai belanja daerahnya (Nawawi, 2021).

Namun desentralisasi fiskal di beberapa negara berkembang masih belum dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan secara optimal, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Menurut studi Rémy Prud'homme (1995), desentralisasi juga dapat membahayakan negara. Pertama, ketimpangan antar daerah dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial, dengan daerah maju lebih siap mengelola desentralisasi dibandingkan daerah tertinggal. Kedua, otonomi daerah yang meningkat berisiko menambah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akibat pengawasan yang lemah. Ketiga, kurangnya koordinasi dapat menyebabkan fragmentasi birokrasi dan layanan publik. Keempat, kebijakan yang tidak koheren antar daerah bisa menghambat mobilitas dan menciptakan ketidakpastian. Kelima, tidak semua daerah memiliki kapasitas administrasi yang memadai, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan. Terakhir, peningkatan kekuasaan lokal berpotensi memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Kesenjangan pendapatan antar daerah akan terus terjadi bahkan semakin besar jika pemerintah tidak berfokus untuk mengurangi kesenjangan tersebut baik dalam sisi fiskal maupun distribusi pendapatan. Wardhana et al., (2013), menjelaskan bahwa kesenjangan regional merupakan masalah struktural dalam perekonomian Indonesia. Selama empat dekade pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan antar daerah tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Situasi ini terjadi bersamaan dengan peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, yang dipengaruhi oleh akumulasi, distribusi, dan dinamika jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan dana harus dilakukan secara efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas alokasi dana, termasuk penyempurnaan mekanisme alokasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemberdayaan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dana tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

METODE

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dana alokasi khusus, alokasi umum, dan bagi hasil yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2007 hingga 2022. Pemilihan dasar tahun ini karena mulai dari tahun 2007, variabel GR, DAU, DAK, dan DBH mempunyai data yang lengkap. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang dikumpulkan dari website

Badan Pusat Statistik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta dari sumber lain yang relevan. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi model analisis penelitian ini, yang menggunakan multiple linear regression dan bentuk fungsional log model (Gujarati & Porter, 2013). Model tersebut dapat ditulis:

$$GR_i = \alpha_0 + \alpha_1 \log DBH_i + \alpha_2 \log DAU_i + \alpha_3 \log DAK_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

dimana:

GR	: Gini Rasio (%)
α_0	: <i>intercept</i>
α_i	: koefisien regresi
$\log DBH_i$: Dana Bagi Hasil (Milyar Rupiah)
$\log DAU_i$: Dana Alokasi Umum (Milyar Rupiah)
$\log DAK_i$: Dana Alokasi Khusus (Milyar Rupiah)
ε_i	: <i>disturbance error</i>

Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi ini perlu memenuhi uji asumsi klasik agar terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas ini menunjukkan residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal dikatakan model regresi yang baik. Uji normalitas membandingkan statistik uji Jarque Berra dengan nilai Probability. Pengambilan keputusan pada asumsi ini jika nilai Probability Jarque Berra lebih besar dari nilai α (5%), maka residual berdistribusi normal dan jika nilai Probability Jarque Berra lebih kecil dari α (5%), maka residual tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat korelasi yang kuat antara variabel bebas. Korelasi yang kuat antara variabel bebas tidak dianjurkan terjadi karena berdampak pada keakuratan koefisien regresi dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Multikolinieritas terjadi ketika hasil uji koefisien korelasi semakin mendekati satu, maka hubungan korelasi semakin kuat.

Uji-F

Uji-F dilakukan untuk mengetahui bahwa model regresi layak atau tidak menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan.

Uji-t

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat. merupakan uji yang dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Apabila nilai t hitung sama dengan nol berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai t hitung tidak sama dengan nol berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

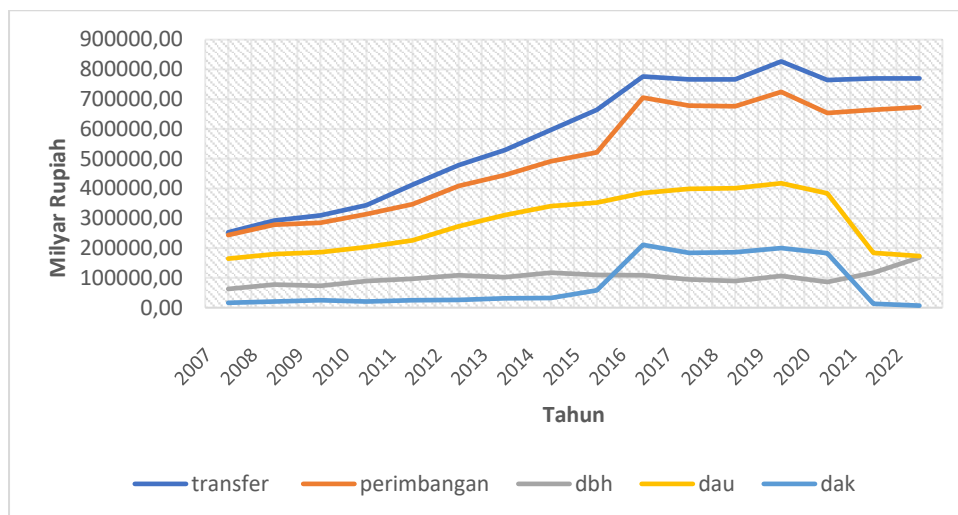
Koefisien Determinasi

Koefisien determinan digunakan untuk melihat baik atau tidaknya suatu model regresi.

Koefisien determinan bisa menentukan besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinan bernilai dari nol sampai satu. Koefisien determinan bernilai sama dengan nol berarti variasi variabel terikat tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sama sekali. Koefisien determinan bernilai sama dengan satu berarti variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.

HASIL

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan kemiskinan. Ketimpangan yang rendah dan tinggi dapat memprediksi perekonomian dan mempengaruhi suatu Negara untuk dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Dalam dua dekade terakhir, ketimpangan di Indonesia mengalami peningkatan. Namun kondisi ini bukan saja hanya terjadi di Indonesia, tapi juga banyak dialami oleh Negara lain, khususnya yang berada dalam kelompok *Middle Income* (Wibowo, 2016).



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia BI, 2023

Gambar 2. Perkembangan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah

Gambar 2 menunjukkan fluktuasi perkembangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah setiap tahunnya. Puncak transfer tertinggi tercatat pada tahun 2019, yang erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia dan berbagai negara di dunia. Pandemi memaksa penutupan dan penghentian banyak aktivitas ekonomi untuk menekan penyebaran virus, sehingga membatasi akses sosial dan ekonomi serta memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, dan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Dalam situasi ini, pemerintah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk mencegah penurunan ekonomi yang lebih dalam. Anggaran transfer tersebut lebih difokuskan pada sektor kesehatan dan pemberian bantuan kepada kelompok yang paling terdampak, seperti pelaku UMKM, pekerja buruh, dan kelompok rentan lainnya.

Hasil Estimasi Persamaan Regresi Linear Berganda

Untuk menunjukkan hubungan Antara DBH, DAU, DAK terhadap GR digunakan regresi linear berganda yang membentuk model estimasi. Model estimasinya adalah:

$$\hat{Y} = -0.375013 - 0.001048DBH + 0.082319DAU - 0.023800DAK \quad (2)$$

Tabel 1. Hasil Output Estimasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.375013	0.124944	-3.001440	0.0110
LOGDAK	-0.023800	0.003567	-6.671435	0.0000
LOGDAU	0.082319	0.011406	7.217416	0.0000
LOGDBH	-0.001048	0.009559	-0.109616	0.9145
R-squared	0.824357	Mean dependent var	0.388000	
Adjusted R-squared	0.780446	S.D. dependent var	0.014464	
S.E. of regression	0.006777	Akaike info criterion	-6.938181	
Sum squared resid	0.000551	Schwarz criterion	-6.745034	
Log likelihood	59.50545	Hannan-Quinn criter.	-6.928291	
F-statistic	18.77343	Durbin-Watson stat	1.900239	
Prob(F-statistic)	0.000079			
Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey				
Prob. Chi-Square	0.9218			

* Kriteria signifikansi pada taraf $\alpha = 5$ persen.

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, BI (Kalkulasi dan Estimasi Penulis, 2024).

Diagnostic Checking

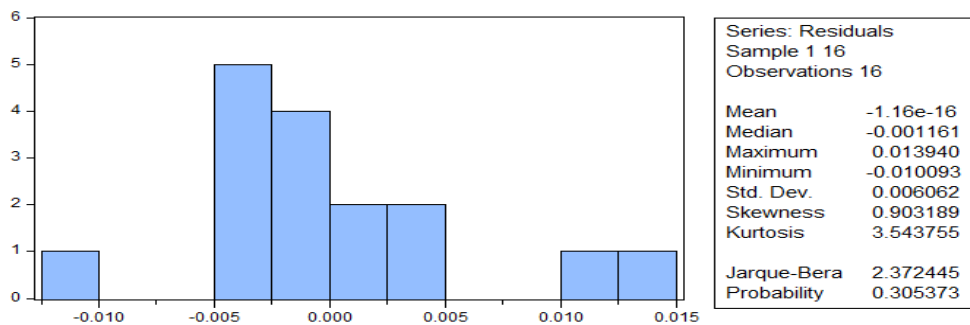
Uji kelayakan model diperlukan dalam tahapan analisis regresi linear berganda meliputi, uji asumsi klasik, uji secara simultan, uji parsial, koefisien determinasi.

Uji Asumsi Klasik

Estimasi model yang terbentuk wajib memiliki sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) serta asumsi residual model regresi wajib memenuhi kriteria IIDN atau identik, independen, dan berdistribusi normal.

Uji Normalitas Data

Dari hasil uji normalitas data dengan dengan uji Jarque-Bera seperti pada Gambar 3. diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar alfa 5 % yaitu sebesar 0.305, sehingga dapat disimpulkan bahwa data DAU, DAK, DBH dan gini rasio dalam penelitian ini berdistribusi normal yang artinya data tersebut memusat pada rata-rata.



Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, BI (data diolah, 2024).

Gambar 3. Uji Normalitas

Uji Multikorelasi

Pengujian adanya korelasi antar variabel independen DBH, DAU, dan DAK menggunakan nilai VIF. Diperoleh dari tabel 3. Bahwa nilai VIF variabel (DBH) = 1.43, (DAU) = 4.55, (DAK) =4.18, $VIF \leq 10$ maka gagal tolak H_0 artinya tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.015611	5438.146	NA
LOGDAK	1.27E-05	541.2787	4.181851
LOGDAU	0.000130	7195.582	4.550067
LOGDBH	9.14E-05	4177.576	1.434751

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, BI (data diolah, 2023).

Uji Autokerasi

Dengan menggunakan metode Durbin-Watson (Tabel.1), pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi jika d berada di antara 1,54 dan 2,46 dan jika d berada di antara 0 dan 1,10 dapat disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif. Hasil perhitungan menunjukkan nilai DW sebesar 1,90, yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 1, nilai Prob.Chi-Square sebesar $0,9218 > 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian variabel DAU, DAK, DBH memiliki hubungan linear dengan residual (variabel diluar model)

Uji Kelayakan Model Signifikansi F

Berdasarkan kriteria statistik, pada penelitian ini seluruh variabel bebas yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (GR). Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai Probabilitas F-statistik sebesar 0.000079, nilai ini lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 5 persen.

Uji Parsial (t-test)

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai t-statistik untuk variabel DAK sebesar -6,671 dan nilai probabilitas sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan nilai koefisien yaitu -0.023800 Hal ini menunjukkan bahwa DAK yang diberikan pusat ke daerah mampu mengurangi kesenjangan pendapatan daerah.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan hasil estimasi, menemukan bahwa variabel DAU memiliki nilai t statistik sebesar 7,217 dan nilai probabilitas sebesar $0.000 < \alpha = 0,05$, yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisiennya sebesar 0,0823 menunjukkan bahwa DAU yang diberikan pusat kepada daerah belum mampu

mengurangi ketimpangan pendapatan, dan malah kenaikan DAU meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan hasil estimasi Eviews diketahui bahwa nilai t-statistik untuk variabel DBH sebesar $-0,1096$ dan nilai probabilitas sebesar $0,914 > \alpha = 0,05$, artinya variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-Square) didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dengan satuan persentase (%). Berdasarkan hasil regresi linier yang ditemukan pada table 1, bahwa variabel bebas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mampu menjelaskan 82,43% variasi ketimpangan pendapatan, dan variabel lain di luar model menyumbang 17,29%.

DISKUSI

Berdasarkan hasil estimasi (Tabel 2.), menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan belum sepenuhnya dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan daerah. Variabel DAK memiliki pengaruh negatif dan signifikan hal ini sesuai dengan hipotesis, artinya ketika anggaran DAK diberikan ke masing-masing daerah, tingkat ketimpangan pendapatan daerah dapat turun. Hal ini sejalan dengan penelitian Wardhana et al. (2013); Arham et al. (2019) Hidayat & Ridwansyah (2020); Dwi Putra Santoso & Mukhlis (2021).

Hasil ini dapat dibuktikan dengan persyaratan teknis penyiapan dana alokasi khusus. Berbeda dengan produk keuangan lainnya yang tidak memerlukan persyaratan khusus, diperlukan beberapa kriteria untuk memperoleh dana alokasi khusus. Kriteria tersebut tentunya tidak hanya mengacu pada kondisi keuangan yang kurang lancar, namun juga kondisi daerah di daerah otonom khusus dan daerah tertinggal di perbatasan, pesisir pantai, dan daerah rentan lainnya. Keputusan ini berarti bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang lebih tepat sasaran. Dana tersebut akan diterima oleh daerah yang memang membutuhkan dana untuk proses pemerataan, berdasarkan perhitungan yang tepat. Lebih lanjut, dana yang diberikan harus berdasarkan prioritas nasional pemerintah pusat, sehingga dana yang diberikan tidak dapat digunakan secara sembarangan atau boros. Dana yang akan digunakan pada sektor-sektor yang diuraikan antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, air minum, sanitasi), infrastruktur pemerintahan desa, sarana dan prasarana daerah perbatasan, kelautan dan perikanan, pertanian, keluarga berencana, dan kehutanan. Sarana dan prasarana di kawasan belum berkembang, fasilitas komersial, energi pedesaan, perumahan dan permukiman, serta keselamatan lalu lintas. Daerah-daerah tersebut sangat membantu dalam proses pemerataan dan menunjang kegiatan perekonomian daerah.

Lebih lanjut, pelaksanaan DAK sendiri ditujukan untuk investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan/atau perbaikan infrastruktur fisik pelayanan kota. Misalnya, departemen infrastruktur jalan di tingkat negara bagian dan kabupaten/kota mempunyai tugas untuk membangun dan memelihara jalan. Akses menuju suatu kawasan dimungkinkan apabila konektivitas jalan di dalam kawasan tersebut cukup dan baik. Hal ini akan mendukung pengembangan koridor ekonomi regional/regional. Pembukaan sambungan jalan raya akan merangsang perekonomian masyarakat setempat. Mulai bermunculan investor-investor yang

menanamkan modalnya berdasarkan potensi daerah. Dengan demikian akan muncul bisnis baru yang mengambil tenaga kerja lokal. Pada akhirnya, hal ini akan menyebabkan lebih sedikit pengangguran dan lebih sedikit ketidaksamaan pendapatan di masyarakat.

Sektor pendidikan adalah contoh tambahan. Infrastruktur yang mendukung kualitas pendidikan, seperti perpustakaan dan fasilitas sekolah lainnya, akan dibangun di daerah dengan dana yang dialokasikan pada sektor pendidikan. Hal ini berdampak tidak langsung pada kualitas sumber daya manusia yang diciptakan atau tersedia di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ketika orang-orang tersebut menjadi pekerja, mereka diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya sehingga memudahkan mereka untuk terserap. Menambahkan lebih banyak pekerja ke pasar tenaga kerja akan mengurangi tingkat pengangguran dan, pada gilirannya, mengurangi ketimpangan pendapatan (Ammar & Bachtiar, 2024).

Berbanding terbalik dengan DAK, variabel DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Putri & Natha (2014); Arham et al. (2019); Ashfahany et al. (2020); Hidayat & Ridwansyah (2020). DAU berpotensi memperburuk ketimpangan pendapatan di Indonesia karena alokasinya yang lebih fokus pada jumlah penduduk dan kebutuhan dasar daerah, tanpa memperhitungkan kapasitas fiskal masing-masing daerah. DAU dirancang untuk membiayai belanja dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang memang penting untuk pemerataan layanan publik. Namun, pemberian DAU yang merata berdasarkan jumlah penduduk tidak memperhatikan perbedaan ekonomi antar daerah. Daerah yang lebih kaya, dengan basis pajak yang lebih besar atau sumber daya alam yang melimpah, lebih mampu memanfaatkan dana tersebut untuk pembangunan. Sebaliknya, daerah miskin yang kurang berkembang sering kali kesulitan mengelola dana tersebut, yang akhirnya membuat kesenjangan ekonomi antar daerah semakin besar.

Selain itu, alokasi DAU untuk pengelolaan administrasi dan pembayaran gaji ASN hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yang bekerja di pemerintahan. Sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor lain, dengan pendapatan yang lebih fluktuatif, tidak merasakan manfaat langsung dari dana ini. Akibatnya, meskipun DAU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, distribusinya yang tidak seimbang dan ketergantungan pada sektor publik justru memperburuk ketimpangan pendapatan, karena hanya segelintir individu yang memperoleh manfaat lebih banyak.

Selanjutnya variabel Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sartika et al., (2019); Hidayat & Ridwansyah (2020) dan Ridho & Wijayanti (2022) yang menemukan hal yang sama. Hal ini menjelaskan bahwa dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah tidak memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Adapun penyebabnya adalah karena sistem alokasi DBH berdasarkan iuran masing-masing pusat daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur maju dan ekonomi yang kuat cenderung menerima DBH pajak lebih tinggi dibandingkan daerah yang kurang berkembang. Akibatnya, daerah tertinggal menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun mereka menerima dana dari hasil pajak namun dengan porsi yang kecil. Perbedaan wilayah menyebabkan kapasitas pembangunan di masing-masing wilayah tidak selaras, yang pada akhirnya menyebabkan pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan

wilayah tertunda. Dwi Putra Santoso & Mukhlis (2021) menyebutkan bahwa pengadaan DBH ini sedikit kontradiktif dengan upaya pemerintah dalam hal pemerataan kapasitas fiskal antar daerah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah berupa alokasi dana khusus, alokasi umum, dan bagi hasil belum sepenuhnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah. Mendukung penjelasan ini, Akita & Miyata (2008) dan Bonet (2006) mengemukakan bahwa upaya desentralisasi dalam menurunkan ketimpangan tidak efektif. Seharusnya dana yang di transfer ke daerah dapat mendorong tingkat produksi secara merata. Dengan demikian dana transfer belum efektif dan efisien untuk mewujudkan redistribusi pertumbuhan produksi dan pendapatan daerah (Djohan et al., 2016; Jamal et al., 2015; Mishra & Agarwal, 2019). Kondisi ini diperparah dengan masalah Covid-19 yang membatasi ruang akses sosial dan ekonomi. Pengalihan anggaran tranfer lebih difokuskan pada penanganan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa masalah ketimpangan pendapatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan belanja pemerintah; kebijakan pemerintah juga berpengaruh. Ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Guiga & Rejeb (2012), yang menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi yang cepat sangat penting, itu tidak cukup untuk mengurangi ketimpangan tanpa kebijakan langsung. Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah fokus utamanya. Jumlah dana alokasi khusus meningkat seiring dengan jumlah pembangunan yang dilakukan di setiap daerah, sehingga pembangunan tersebar secara merata di setiap daerah. Oleh karena itu, pembangunan yang lebih merata akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi terakselerasi dengan peluang yang memadai, maka akan merangsang roda perekonomian, meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi ketenagakerjaan, yaitu upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja dilakukan melalui: (1) mendorong transformasi struktural untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan yang produktif; (2) mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkelanjutan; (3) mengadakan program pelatihan padat karya untuk meningkatkan skill masyarakat sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan, yang akan direspon dengan meningkatnya produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berperan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Siklus ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Meskipun demikian, untuk mencapai peluang pekerjaan yang memadai, diperlukan dukungan untuk sumber daya manusia yang unggul melalui investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan layanan publik. Kebijakan pemerintah fokus pada penciptaan tenaga kerja terampil yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif sehingga distribusinya berkeadilan. Huang & Morgan (2018) menyatakan bahwa untuk menuju negara berpendapatan menengah yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan efisiensi, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan fokus pada industri dengan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, melalui kebijakan fiskal, pemerintah mendorong lebih lanjut peningkatan keterampilan pekerja Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus dapat menurunkan ketimpangan, namun dana alokasi umum tidak dapat menurunkan ketimpangan, dan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap dampak ketimpangan pendapatan. Sehingga ketiga alokasi dana ini belum sepenuhnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan tidak dapat diselesaikan dengan pengeluaran belanja pemerintah saja, namun juga tergantung pada bentuk kebijakannya. Pemerintah pusat dan daerah harus dapat menerapkan kebijakan yang dapat mendorong meningkatkan pendapatan perkapita dan mengerem laju kenaikan ketimpangan pendapatan.

REKOMENDASI

Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang lebih terfokus pada pemerataan pembangunan antar daerah. Salah satu langkah utama yang dapat diambil melalui peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dapat diarahkan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang spesifik di daerah tertinggal. Peningkatan DAK akan memastikan bahwa dana lebih banyak dialokasikan ke daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, peningkatan DAK harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar penggunaan dana benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Banyak pemerintah daerah yang, pada kenyataannya, lebih fokus pada penggunaan dana hanya untuk memenuhi target pengeluaran atau menghabiskan anggaran pusat, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang didanai benar-benar relevan atau bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengalokasian DAK harus disertai dengan kajian yang mendalam mengenai prioritas pembangunan dan evaluasi yang transparan atas dampaknya

Kemudian pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap disparitas ekonomi antar daerah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengubah mekanisme alokasi DAU yang tidak hanya memperhatikan jumlah penduduk dan kebutuhan dasar, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas fiskal dan potensi ekonomi daerah. Pemerintah dapat memberikan penyesuaian alokasi berdasarkan perbedaan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Selain itu, DAU harus diarahkan untuk mendanai proyek-proyek strategis yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, seperti infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor produktif, pendidikan berkualitas, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing SDM di daerah-daerah tertinggal. Dengan demikian, DAU tidak hanya menjadi instrumen pemerataan keuangan, tetapi juga berperan sebagai pendorong pembangunan yang lebih merata, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.

Selanjutnya dari sisi alokasi dana bagi hasil, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. Kebijakan yang dapat diterapkan termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan sektor unggulan lokal, seperti pertambangan dan perikanan, untuk menciptakan tenaga kerja terampil yang dapat mengelola SDA secara efisien. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan di daerah agar mereka mampu mengelola DBH dengan lebih baik dan mengoptimalkan manfaatnya bagi pembangunan lokal. Kebijakan yang bisa diterapkan adalah memberikan insentif bagi daerah untuk berinvestasi dalam

pengembangan SDM, sehingga SDM di daerah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

REFERENSI

- Akita, T., & Miyata, S. (2008). Urbanization, educational expansion, and expenditure inequality in Indonesia in 1996, 1999, and 2002. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 13(2). <https://doi.org/10.1080/13547860801923558>
- Ammar, Z., & Bachtiar, N. (2024). Measuring Economic Contribution and Per Capita Income Disparities in Indonesia Using the Theil Index. *JOURNAL OF MANAGEMENT, ACCOUNTING, GENERAL FINANCE AND INTERNATIONAL ECONOMIC ISSUES*, 4(1), 144–154.
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Colombian experience. *Annals of Regional Science*, 40(3). <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>
- Chongvilaivan, A., & Kim, J. (2016). Individual Income Inequality and Its Drivers in Indonesia: A Theil Decomposition Reassessment. *Social Indicators Research*, 126(1). <https://doi.org/10.1007/s11205-015-0890-0>
- Dewi Sartika, U., Siddik, S., & Choiriyah, C. (2019). PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, NILAI TUKAR, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Ilmu Manajemen*. <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1821>
- Djohan, S., Hasid, Z., & Setyadi, D. (2016). Government Expenditure as Determinants of Economic Growth and Income Inequality of Inter-Province of the Islands in Indonesia. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 7(22), 148-158–158.
- Dwi Putra Santoso, F., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 146–162. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>
- Guiga, H., & Rejeb, J. Ben. (2012). Poverty, growth and inequality in developing countries. In *International Journal of Economics and Financial Issues* (Vol. 2, Nomor 4, hal. 470–479).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics (Fifth Edition). In *Introductory Econometrics: A Practical Approach*.
- Huang, B., & Morgan, P. J. (2018). *MIDDLE-INCOME TRAP IN ASIA Avoiding the Middle-Income Trap in Asia*. Asian Development Bank Institute.
- Jamal, A., Muhammad, S., Masbar, R., & Aliasuddin. (2015). Did Indonesian political economic reform reduce economic growth disparities among regions? *DLSU Business and Economics Review*, 25(1), 81–94.
- Kuźmar, S. (2023). Income inequality and economic growth: the reexamination of the existence of Kuznets curve: evidence from CEE countries. *Ekonomia i Prawo*, 22(2), 237–250. <https://doi.org/10.12775/eip.2023.014>
- Miranti, R., Vidyattama, Y., Hansnata, E., Cassells, R., & Duncan, A. (2013). *Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia*. 148, 1–103.
- Mishra, A., & Agarwal, A. (2019). Do infrastructure development and urbanisation lead to rural-urban income inequality? Evidence from some Asian countries. *International Journal of Sustainable Economy*, 11(2), 167–183. <https://doi.org/10.1504/IJSE.2019.099054>
- Nawawi, A. (2021). Analisis Respon Belanja Apbd Terhadap Transfer Tidak Bersyarat Dari

- Pemerintah Pusat: Studi Kasus Seluruh Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2020. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1), 41.
- Oktarina, N., & Yuliana, Y. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat : Pembuktian Hipotesis Kuznet. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.38035/jgia.v1i1.8>
- Putri, N. putu V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. In *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* (Vol. 4, Nomor 1, hal. 41–49).
- Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7>
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5737>
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap Income Inequality and Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 111–132.
- Yusuf, A. A., & Halim, P. R. (2021). *Inequality and structural transformation in the changing nature of work: The case of Indonesia* (2021/81, Nomor May 2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2021/019-1>